

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 3, 2024, Halaman 301-305
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12633209)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12633209>

Dampak Pengawasan Pemerintah Terhadap Pencegahan Korupsi Pada Kasus Walikota Cimahi

Muhammad Qais Fathin^{1*}, Annida Safitri¹, Fitri Hasanah Nurpadilah¹, Deta Renova¹, Ivan Darmawan¹

¹Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: muhammad21050@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Pencegahan korupsi, khususnya di pemerintahan daerah di Cimahi, sangat bergantung pada pengawasan pemerintah. Tiga Wali Kota Cimahi tersangkut berbagai kasus korupsi, hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem pengawasan. Kajian kasus korupsi di Cimahi, asal usulnya, dan upaya pengawasan yang dilakukan instansi pemerintah. Berbasis kualitatif dan studi literatur, menggunakan data dari berbagai literatur yang relevan untuk mendukung analisis. Studi menunjukkan bahwa korupsi di Cimahi dipengaruhi oleh budaya korupsi sistemik di pemerintahan dan tidak adanya perubahan sistemik akibat adanya penyimpangan dari kasus tersebut. Pemerintah Kota Cimahi telah mengambil langkah-langkah pencegahan korupsi, antara lain sosialisasi anti korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan transparansi melalui pusat pemantauan pencegahan sebagai bagian dari *Monitoring Center for Prevention*. Maka dengan ini diharapkan pemerintah Cimahi dapat menjadi pemerintahan yang transparan, penataan tata kelola yang baik dan bebas korupsi serta pemerintah kota yang lebih percaya diri terhadap warganya.

Kata kunci: *Pengawasan Pemerintah, Pencegahan Korupsi, Tata Kelola Pemerintahan, Transparansi dan Akuntabilitas*

Abstract

The prevention of corruption, especially in local government in Cimahi, is highly dependent on government supervision. Three mayors of Cimahi have been implicated in various corruption cases, indicating the need to improve the supervisory system. The study of corruption cases in Cimahi, their origins, and supervision efforts made by government agencies. Based on qualitative and literature study, using data from various relevant literatures to support the analysis. The study shows that corruption in Cimahi is influenced by a systemic culture of corruption in the government and the absence of systemic change due to the irregularities of the case. The Cimahi City Government has taken steps to prevent corruption, including anti-corruption socialization, bureaucratic reform, and increased transparency through the Monitoring Center for Prevention. It is hoped that the Cimahi government can become a transparent government, structuring good governance and free of corruption as well as a city government that is more confident in its citizens.

Keywords: *Government Oversight, Corruption Prevention, Governance, Transparency and Accountability*

Article Info

Received date: 15 May 2024

Revised date: 19 Juni 2024

Accepted date: 25 Juni 2024

PENDAHULUAN

Menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dan benar merupakan harapan seluruh negara di dunia ini. Adapun fungsi-fungsi tersebut antara lain: fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pengawasan. Setiap fungsi memiliki bagian masing-masing, serta berkontribusi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. Negara satu dengan negara lainnya memiliki kebutuhan masing-masing yang berbeda disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya. Apabila memang menginginkan berjalannya fungsi pemerintahan dengan baik dan benar. Maka kecocokan inilah yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintah.

Indonesia selalu berupaya menjalankan fungsi pemerintahannya dengan baik dan benar. Hal itu terbukti dari berbagai pembangunan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Misalnya saja pembangunan IKN, Kereta Cepat Bandung-Jakarta, dan lainnya. Namun pada proses pembangunan tersebut seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk kepentingan diri sendiri. Salah satu yang paling sering terjadi adalah tindakan korupsi. Tindakan ini dapat disebabkan oleh adanya celah-celah yang tidak terpantau yang memungkinkan untuk seseorang dapat memanfaatkan

keadaan dengan melakukan perilaku yang menguntungkan diri sendiri. Korupsi di kalangan para pejabat di Indonesia sepertinya sudah menjadi bagian dari budaya yang sulit diberantas. Contohnya saja kasus korupsi yang melibatkan 3 Walikota Cimahi pada proses pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerah tersebut.

Ketiga Walikota Cimahi tersebut diantaranya kasus korupsi yang dilakukan oleh Itoc Tochija sebagai Walikota Cimahi periode 2002-2012 pada pembangunan Pasar Atas dan proyek Pasar Raya Cibeureum. Selanjutnya, kasus korupsi yang dilakukan oleh Atty Suharty sebagai Walikota Cimahi periode 2012-2017 terkait proyek yang sama dengan sang Suami, yakni pembangunan Pasar Atas Cimahi¹. Terakhir, kasus yang dilakukan oleh Ajay Muhammad Priatna sebagai Walikota Cimahi periode 2017-2020 yang menerima gratifikasi terkait pembangunan Rumah Sakit Bunda².

Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi dapat diartikan bahwa lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, baik oleh lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan maupun dari eksternal. Dengan begitu, pemerintah terkhusus Pemerintah daerah Cimahi perlu membenahi pengawasan yang dilakukan agar semakin kuat dengan tidak terbentuk lagi celah korupsi yang dilakukan oleh pejabatnya. Sebab, ketika pengawasan diperkuat maka fungsi pemerintahan dapat terlaksana dengan baik dan benar.

METODE

Metode Penelitian berperan besar dalam menentukan upaya pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian, dengan kata lain metode penelitian memberikan petunjuk bagaimana sebuah penelitian dilakukan. Metode penelitian juga mengandung makna prosedur dan cara melakukan pengujian data yang diperlukan untuk memecahkan dan menjawab masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yang memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Zed (2004) berpendapat terdapat empat tahap yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyusun bibliografi kerja, mengatur waktu, dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mengkonstruksi informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan dalam penelitian.

Waktu

Waktu penelitian dapat didefinisikan sebagai kegiatan mulai dari persiapan penelitian, pengamatan konflik, penetapan judul, dan sampai dengan penyusunan penelitian. Dengan demikian, waktu yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini kurang lebih 1 (satu) bulan, dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2024. .

Objek

Dari uraian permasalahan yang telah dipaparkan, penulisan ini akan meneliti mengenai pengawasan pemerintah terhadap pencegahan kasus korupsi di Cimahi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Korupsi yang Pernah Terjadi

Korupsi di Indonesia telah ada jauh sebelum negara ini merdeka. Beberapa sumber menyebutkan bahwa praktik korupsi sudah terjadi sejak zaman kerajaan Nusantara, di mana kekuasaan atau jabatan dijual bebas kepada siapa saja yang mampu membayarnya (Retnowati & Utami, 2014). Menurut World Bank pada tahun 2000, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik demi keuntungan pribadi. Definisi ini telah menjadi standar internasional dalam mendefinisikan korupsi.

¹ Flora, Maria. (2020, 30 November). *Deretan Kasus Korupsi 3 Wali Kota Cimahi, dari Ajay Priatna hingga Atty Suharty*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/4420371/deretan-kasus-korupsi-3-wali-kota-cimahi-dari-ajay-priatna-hingga-atty-suharty?page=3>.

² Permadi, A. & Purba, D. (2021, 25 August). *Terbukti Korupsi, Wali Kota Nonaktif Cimahi Ajay Priatna Divonis 2 Tahun Penjara*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2021/08/25/134544578/terbukti-korupsi-wali-kota-nonaktif-cimahi-ajay-priatna-divonis-2-tahun?page=all>.

Kota Cimahi pun tidak terlepas dari kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah. Salah satu kasus yang sempat menarik perhatian publik diantaranya, kasus yang menjerat Wali Kota Cimahi yakni, Ajay Muhammad Priatna yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait izin pembangunan rumah sakit di Cimahi, Jawa Barat. Diduga Ajay sebagai Wali Kota Cimahi kerap menerima sejumlah uang dari Komisaris RS Umum Kasih Bunda berinisial HY, perihal tersebut HY pun turut ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi ini.

Akibat dari tindak pidana korupsi tersebut Ajay dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³.

Mirisnya kasus korupsi ini seakan akan terbentuk menjadi jejak estafet yang terjadi pada tiga walikota yang pernah menjabat di Kota Cimahi. Hal ini dilihat dari kasus korupsi sebelumnya yang menjerat Itoc Tochija, Itoc yang divonis tujuh tahun penjara setelah terbukti bersalah atas kasus korupsi pembangunan Pasar Atas, Atty yang merupakan istri dari Itoc Tochija pun turut terlibat dalam kasus ini dan divonis 5 tahun bui. Pun ditengah hukuman yang sedang dijalani, Itoc kembali terjerat kasus korupsi lainnya, yakni ia terlibat pada kasus dugaan korupsi proyek Pasar Raya Cibeureum di Kota Cimahi yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara sejumlah Rp 37 miliar⁴. Dari kasus kasus yang sudah dipaparkan dapat dilihat adanya pembentukan pola estafet korupsi yang melibat walikota Kota Cimahi.

Penyebab Kasus Korupsi di Cimahi

Berbagai macam kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna, beserta para pendahulunya yaitu Atty Suharti Tochija dan Itoc Tochija, menunjukkan adanya indikasi permasalahan sistemik yang terjadi secara beruntun sehingga memicu terjadinya korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Salah satu penyebabnya adalah perilaku korupsi yang sudah menjadi budaya dalam sebuah organisasi pemerintahan, hal ini juga didorong dengan sistem politik yang tidak mengalami perubahan setelah terjadinya penyimpangan, maka dengan kata lain sebuah organisasi pemerintahan tidak melakukan perbaikannya secara menyeluruh. Dari penyebab penyebab tersebut menciptakan lingkungan dimana para pejabat daerah merasa aman dan mudah untuk melakukan penyimpangan berupa tindak pidana korupsi, oleh karenanya perilaku korupsi menjadi lazim dan menjadi cara kerja yang diterima oleh oknum birokrat pemerintahan.

Zaenur Rohma seorang Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan guna menghadapi maraknya fenomena ini maka harus ada upaya untuk memutus rantai korupsi dalam organisasi pemerintahan, KPK sebagai lembaga pengawas harus mengupayakan pengawasan dan pembinaan tata kelola daerah melalui strategi koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah). Dengan Upaya tersebut dapat memfasilitasi dari adanya integrasi dan koordinasi yang saling mendukung, sehingga dapat membangun kembali budaya bersama untuk menolak terhadap segala bentuk praktik-praktik tindak pidana korupsi.

Upaya Pengawasan yang Sudah Dilakukan

Kasus korupsi yang melibatkan beberapa Wali Kota Cimahi menjadi perhatian serius, dan Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya mengatasi masalah ini dengan berbagai langkah pencegahan. Sesuai arahan KPK, Pemerintah Kota Cimahi fokus pada penataan kebijakan dan regulasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan pelayanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

PJ Wali Kota Cimahi, Dikdik S. Nugrahawan, menegaskan bahwa sosialisasi anti-korupsi dan reformasi birokrasi dilakukan secara rutin, termasuk saat apel pagi, untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap risiko korupsi. Pemerintah Kota Cimahi juga melaksanakan perbaikan

³ CNN Indonesia "KPK Tetapkan Wali Kota Cimahi Tersangka Korupsi RS"
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201128130514-12-575628/kpk-tetapkan-wali-kota-cimahi-tersangka-korupsi-rs>. Diakses 29 Juni 2024.

⁴ Detik News "Jejak 'Estafet Korupsi' di Bandung Barat dan Cimahi"
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5521832/jejak-estafet-korupsi-di-bandung-barat-dan-cimahi>. Diakses 29 Juni 2024

layanan publik untuk mengurangi peluang korupsi dalam interaksi dengan masyarakat. Penguatan pengawasan dilakukan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), yang memantau tujuh area rawan korupsi dan satu area penguatan institusi. Langkah ini mencakup pemantauan dan perbaikan di bidang perencanaan dan penganggaran, manajemen aset, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan.

Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap dapat membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Selain itu, Pemerintah Kota Cimahi berpartisipasi aktif dalam program nasional pencegahan korupsi, dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih dan berintegritas tinggi. Diharapkan upaya-upaya tersebut dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kota Cimahi dan mencegah terulangnya kasus korupsi di masa depan.

SIMPULAN

Korupsi di Kota Cimahi telah menjadi masalah serius yang melibatkan beberapa Wali Kota, seperti Ajay Muhammad Priatna, Atty Suharti Tochija, dan Itoc Tochija. Praktik korupsi yang dilakukan oleh para pejabat ini menunjukkan adanya permasalahan sistemik dan budaya korupsi yang telah mengakar dalam pemerintahan daerah, yang seolah olah menjadi estafet tindak pidana. Meskipun upaya pengawasan telah dilakukan, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya korupsi.

Kasus ini turut menunjukan bahwa pengawasan pemerintah memiliki cukup membawa dampak signifikan dalam mencegah korupsi. Namun, pengawasan yang dilakukan harus diperkuat dan dioptimalkan, terutama dengan meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pemanfaatan teknologi melalui e-government untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang, diperlukan kolaborasi yang maksimal antara pemerintah, masyarakat, dan media dalam mengawasi kinerja pemerintahan serta menyajikan data yang akurat dan transparan. Selain itu, peninjauan kembali regulasi dan prosedur birokrasi yang berpotensi menjadi celah korupsi sangat diperlukan, untuk memastikan regulasi dan prosedur birokrasi tepat sasaran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas tinggi dapat terwujud di Kota Cimahi.

SARAN

Berdasarkan uraian diatas, melihat kondisi serta upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi, maka penulis menyarankan perlu adanya peningkatan kapabilitas integritas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kota Cimahi untuk mencegah terjadinya kasus korupsi sejak dini. Lalu diperlukannya peninjauan kembali terkait regulasi dan prosedur birokrasi yang mampu dapat menjadi celah kasus korupsi. Selain itu, dengan kemajuan teknologi, maka pemanfaatan *e-government* sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan manusia dan meningkatkan transparansi anggaran. Maka dibutuhkan kerjasama baik dari pihak Pemerintah Kota Cimahi dengan masyarakat maupun media agar dapat berperan aktif dalam mengawasi serta mengoptimalkan kinerja yang ada, dengan menyajikan data yang akurat serta transparan.

REFERENSI

- Adlini, M. et.al. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6 (1). 974-980.
- Al-Faruqi, M. I. (2024, February). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 4, No. 1).
- Flora, Maria. (2020, 30 November). *Deretan Kasus Korupsi 3 Wali Kota Cimahi, dari Ajay Priatna hingga Atty Suharty*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/4420371/deretan-kasus-korupsi-3-wali-kota-cimahi-dari-ajay-priatna-hingga-atty-suharti?page=3>.
- Maulana, Yudha. (2020, 27 November). *Jejak Korupsi Tiga Wali Kota Cimahi dari Itoc, Atty, dan Ajay M Priatna*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5272187/jejak-korupsi-tiga-wali-kota-cimahi-dari-itoc-atty-dan-ajay-m-priatna>.

- Permadi, A. & Purba, D. (2021, 25 August). *Terbukti Korupsi, Wali Kota Nonaktif Cimahi Ajay Priatna Divonis 2 Tahun Penjara*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2021/08/25/134544578/terbukti-korupsi-wali-kota-nonaktif-cimahi-ajay-priatna-divonis-2-tahun?page=all>.
- Satria, I. R., & Kurniawan, H. (2022). Telaah Teori Demokrasi Prosedural: Refleksi Pilkada di Kota Cimahi. T. *Khazanah Multidisiplin*, 3(2), 251-266.
- Silaban, F. A. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Wali Kota Cimahi Periode 2012-2017 yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pembangunan Pasar Atas*. (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Sundari, L. S. (2022). Cegah Celah Korupsi, Pemkot Cimahi Gelar Sosialisasi Hingga Reformasi Birokrasi. *Koran Gala*.